

Peran Pemerintah Kota Singkawang Pasca-*Letter of Intent (LoI) Friendship City* dengan Pemerintah Kota Miri dalam Bidang Pariwisata

Posmanto Marbun, Jennifer Lius, Muhammad Rafiq

Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kerja sama sister city antara Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kota Miri setelah penandatanganan Letter of Intent (LoI) Friendship City, khususnya di bidang pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian dasar, yang bertujuan untuk menggambarkan peran aktif Pemerintah Kota Singkawang dalam menindaklanjuti LoI melalui berbagai upaya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik paradiplomasi. Teknik pengumpulan data meliputi aktivitas wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Singkawang berperan aktif melalui kunjungan delegasi, promosi pariwisata, dan partisipasi dalam festival HAM nasional. Hambatan yang dihadapi meliputi kegagalan komunikasi, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat serta masyarakat. Pemerintah kota Singkawang disarankan mengadakan pelatihan diplomasi, membentuk kelompok kerja lintas perangkat daerah, dan meningkatkan transparansi guna mendukung keberlanjutan program sister city.

Kata Kunci: *Friendship City; Letter of Intent; Paradiplomasi; Pariwisata; Sister City.*

Abstract

This study examines the sister city cooperation between the Singkawang City Government and the Miri City Government following the signing of the Letter of Intent (LoI) Friendship City, particularly in the tourism sector. This research uses a descriptive qualitative method with a basic research approach, which aims to describe the active role of the Singkawang City Government in following up on the LoI through various efforts, as well as identifying the obstacles faced in the practice of paradiplomacy. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using a descriptive qualitative method based on an interactive model of analysis, consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the Singkawang City Government actively participates through delegation visits, tourism promotion, and participation in national human rights festivals. The obstacles faced include communication failures, limited human resource capacity, and insufficient support from the central government and the community. To address these issues, the Singkawang City Government is advised to conduct diplomacy training, establish cross-agency working groups, and enhance transparency to support the sustainability of the sister city program.

Keywords: *Friendship City; Letter of Intent; Paradiplomacy; Tourism; Sister City*

Latar Belakang

Kota Singkawang yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dikenal sebagai kota multikultural yang dihuni oleh beragam etnis seperti Tionghoa, Dayak, dan Melayu—dikenal dengan akronim TIDAYU (Patriani 2023). Keberagaman budaya ini tidak hanya menjadi identitas sosial yang khas, tetapi juga menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal. Meskipun tidak berbatasan langsung dengan Malaysia, Kota Singkawang tetap menarik minat investor lokal maupun internasional, terutama karena kekayaan budaya dan sektor pariwisata yang khas. Julukannya sebagai “Kota Seribu Kelenteng” turut memperkuat citra destinasi ini sebagai kota tujuan wisata yang unik dan potensial. Salah satu pihak yang menunjukkan ketertarikan untuk menjalin kerja sama adalah Pemerintah Negara Bagian Miri, Malaysia, yang terletak di wilayah Serawak. Ketertarikan ini muncul karena potensi Kota Singkawang dinilai masih sangat terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Oxtora 2022).

Dasar utama yang melandasi kerja sama antara Pemerintah Negara Bagian Malaysia (khususnya Kota Miri) dan Pemerintah Kota Singkawang adalah adanya kesamaan nilai dalam hal toleransi serta warisan kebudayaan. Komitmen Pemerintah Kota Miri untuk menjalin hubungan kemitraan dengan Kota Singkawang tercermin melalui penandatanganan *Letter of Intent (LoI) Friendship City* oleh Datuk Bandar Bandaraya Miri, Adam Yii Siew Sang (Suhendra 2022). Kesepakatan yang dimulai pada 1 Oktober 2022 dan direncanakan berlaku hingga tahun 2027 ini memuat kesepakatan kerja sama antara Otoritas Kota Miri, Serawak, dan Pemerintah Kota Singkawang, yang berfokus pada sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang untuk pengembangan kolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, dan perdagangan (Munir 2022).

Sebagaimana diungkapkan oleh Marchetti (2021), bahwa interaksi antara pemerintah pusat dan otoritas lokal dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama: kolaborasi, kompetisi, kolaborasi kompetitif, dan ketidakpedulian. Dalam konteks ini, hubungan paradiplomasi antara Kota Singkawang dan Miri mencerminkan upaya pemerintah lokal untuk memperluas jaringan internasional mereka—yang sering kali bergantung pada sejauh mana negara mengakui atau membatasi peran kota dalam urusan internasional. Dalam kerangka *city diplomacy*, bentuk kemitraan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi dinamika global melalui kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang (Marchetti 2021). Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Tavares (2016), yang menekankan bahwa dalam banyak kasus, paradiplomasi dijalankan dalam bentuk seremonial dan simbolik, seperti

perjanjian kota kembar, yang berperan penting dalam membangun hubungan budaya, memperkuat citra kota di mata internasional, dan mendorong keterlibatan warga dalam aktivitas lintas negara. Kerja sama tersebut membuka ruang pertukaran sosial dan budaya yang dapat berdampak pada peningkatan rasa saling pengertian, penguatan identitas lokal, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis budaya seperti pariwisata dan ekonomi kreatif (Tavares 2016)

Dalam konteks ini, kemitraan antara Kota Singkawang dan Miri tidak hanya memiliki makna strategis dalam hubungan internasional sub-nasional, tetapi juga mencerminkan paradiplomasi berbasis masyarakat yang memperkuat keterhubungan lintas batas. Penandatanganan LoI antara Pemerintah Kota Singkawang dan Kota Miri pada tahun 2022 merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan lokal. Kerja sama ini membuka ruang bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas konektivitas serta meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Singkawang. Berdasarkan data distribusi PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2021, tercatat tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu: perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor senilai 18,99%, konstruksi sebesar 16,46%, serta industri pengolahan yang mencapai 14,74% (BPS 2024).

Meskipun sektor pariwisata tidak tercantum secara eksplisit dalam klasifikasi lapangan usaha PDRB, ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas kepariwisataan. Peningkatan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, cenderung mendorong pertumbuhan sektor perdagangan melalui konsumsi barang dan jasa. Sektor konstruksi juga tumbuh seiring dengan pembangunan infrastruktur pendukung wisata, seperti penginapan, pusat kuliner, dan fasilitas publik lainnya. Di sisi lain, sektor industri pengolahan, khususnya yang berbasis produk lokal, kerap memperoleh nilai tambah dari meningkatnya permintaan akan cendera mata dan produk khas daerah. Dengan demikian, meskipun sektor pariwisata tidak didefinisikan secara terpisah, tetap berperan penting sebagai penggerak tidak langsung yang berkontribusi terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi utama di Kota Singkawang. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan dan promosi pariwisata tetap menjadi strategi relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih dalam konteks kerja sama internasional yang terbangun melalui LoI dengan Kota Miri.

Kerja sama *sister city* yang telah dirumuskan antara Pemerintah Miri, Serawak dengan Kota Singkawang melalui LoI perlu ditindak lanjuti dengan serius oleh Pemerintah Kota Singkawang. Hal ini dikarenakan dari sekitar 47 kerja sama *sister city* dari 33 provinsi di Indonesia, kurang lebih 15% memiliki ikatan kerja sama yang baik, 20% mempunyai ikatan yang sangat baik dan 65% tidak melaksanakan kerja sama dengan baik (Safitri et al. 2023). Oleh sebab itu, dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Miri, Pemerintah Kota Singkawang perlu memperhatikan tantangan yang biasanya muncul, yaitu kapasitas kota/daerah berupa sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan peraturan setempat/lokal (Sindo 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Singkawang sebagai aktor lokal hendaknya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM); mulai dari pegawai atau pelaksana yang mewakili pemerintah daerah dan berbagai lapisan masyarakat seperti akademisi, kelompok profesi, asosiasi serta pihak ketiga yakni swasta yang akan terlibat dalam kerja sama *sister city*. Kehadiran pemerintah daerah sangatlah penting, mengingat pemerintah sebagai bagian dari jaringan institusi yang kompleks dengan kewenangan dan kemampuan yang luas untuk melakukan kerja kolaboratif dengan pemerintah daerah di negara lain (Putra 2021). Selain itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam program *sister city* diharapkan agar dapat memberikan saran dan dukungan bagi keberlanjutan kerja sama tersebut sehingga kebermanfaatannya dapat diterima langsung oleh masyarakat.

Dukungan dari institusi legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang juga perlu dipertimbangkan agar setiap poin dari kerja sama tidak bertentangan terhadap regulasi atau peraturan daerah yang sudah ada. Kemudian, Pemerintah Kota Singkawang juga hendaknya menyiapkan anggaran yang memadai dalam mempersiapkan berbagai perhelatan akan diadakan bersama Pemerintah Kota Miri. Anggaran tersebut bisa saja bersumber dari Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana bantuan dari pihak ketiga.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergitas dan inisiatif dari kedua belah pihak yaitu Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kota Miri sehingga dapat menguntungkan berbagai pihak yang turut terlibat dalam kerja sama *sister city*. Selain itu, kedua belah pihak dapat menyusun rencana dan strategi untuk memperkuat langkah awal kerja sama *sister city* dari LoI untuk menuju tahapan *Memorandum of Understanding* agar kerja sama tersebut dapat berjalan secara efektif dan kedua belah pihak sepakat, sehingga kerja sama *sister city* yang terjalin dapat dikatakan sebagai kerja sama internasional. Kedua belah pihak juga harus memiliki persepsi dan kepentingan yang sama agar menjadi landasan bersama dalam melakukan kerja sama *sister city*.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis peran pemerintah daerah, tantangan internal dan eksternal, serta langkah strategis pasca-penandatanganan LoI antara Kota Singkawang dan Kota Miri. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang berbagai aspek yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kerja sama *sister city* dan bagaimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung pengembangan pariwisata dan kolaborasi budaya secara berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas Pemerintah Kota Singkawang sebagai aktor utama dalam menindaklanjuti LoI melalui berbagai upaya yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Miri, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan efektivitas kerja sama di bidang pariwisata. Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran faktor-faktor penghambat serta langkah strategis yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait untuk memperkuat kerja sama tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian dasar. Penelitian dasar bersifat teoritis dan bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan pada suatu bidang tertentu (Pujiati 2024). Penelitian dasar ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman lebih dalam mengenai peran pemerintah dalam kerja sama kota kembar atau *sister city*, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap pengembangan pariwisata, dan bukan sekadar untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan praktis.

Meskipun menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini turut memanfaatkan data kuantitatif sebagai data pendukung, khususnya untuk melihat tren jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kota Singkawang sebelum dan sesudah kerja sama *sister city* dengan Kota Miri. Data kuantitatif tersebut diperoleh dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang. Penggunaan data ini bertujuan bukan untuk uji statistik, melainkan untuk memperkuat analisis kualitatif dengan memberikan konteks faktual yang menggambarkan perubahan yang terjadi dalam sektor pariwisata. Dengan demikian, data kuantitatif menjadi bagian dari bukti empiris yang mendukung interpretasi dan pemahaman teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan dalam literatur mengenai dinamika peran pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata melalui kerja sama internasional. Oleh karena itu, meskipun analisis kebijakan menjadi bagian dari penelitian ini, hal tersebut tidak mengubah esensi penelitian yang berfokus pada pemahaman teoritis.

Tahapan pada penelitian ini meliputi pra-penelitian, penelitian lapangan, dan analisis data. Pada tahap awal, dilakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan serta mengumpulkan data pendukung dari penelitian terdahulu. Selanjutnya, penelitian lapangan dilaksanakan melalui wawancara dengan informan terpilih dan studi pustaka terhadap buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan LoI dan peran pemerintah dalam kerja sama *sister city*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *interactive model analysis* yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles & Huberman 1992).

Untuk menunjang validitas data dan relevansi informasi yang diperoleh, teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik ini memungkinkan peneliti memilih sumber data berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2013), *purposive sampling* merujuk pada teknik pemilihan informan dengan pertimbangan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan dalam penelitian ini dipilih karena keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan kerja sama *sister city* antara Kota Singkawang dan Kota Miri. Adapun informan yang dimaksud meliputi: (1) Virgiani Dini Happy, S.IP– Staf Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Singkawang, Bagian Kerja Sama; dan (2) Dedy Rustandi, S.Sos–Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang.

Selanjutnya, keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik mengacu pada pengumpulan data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan mendapatkan data dari berbagai sumber menggunakan teknik yang seragam (Sugiyono 2013). Seluruh proses penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran Pemerintah Kota Singkawang dalam memperkuat kerja sama pariwisata melalui inisiatif *sister city* dengan Kota Miri.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan konsep peran dan teori paradiplomasi untuk menganalisis dinamika hubungan internasional yang melibatkan Pemerintah Daerah. Menurut Harnisch (2011), peran adalah posisi sosial yang dibentuk oleh aktor dalam kelompok yang terorganisir. Dalam konteks ini, negara atau pemerintah daerah memainkan perannya melalui kebijakan luar negeri atau kerja sama internasional dengan aktor seperti negara atau subnegara lainnya. Konsep peran nasional, sebagaimana

dikemukakan oleh K.J. Holsti, menggambarkan bagaimana suatu negara menjalankan berbagai peran dalam sistem internasional melalui kebijakan luar negerinya (Putri 2014). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan konsep peran dengan melihat dua aspek utama, yaitu dimensi peran dan sudut pandang analisis peran. Dimensi peran yang dianalisis meliputi peran normatif, yakni bagaimana Pemerintah Kota Singkawang menguatkan identitas daerah melalui kerja sama internasional yang tercermin dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, serta peran fungsional, yaitu upaya untuk mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui hubungan internasional. Sedangkan dari segi sudut pandang analisis peran, penelitian ini menitikberatkan pada perspektif internal, yakni bagaimana Pemerintah Kota Singkawang mendefinisikan dan mengartikulasikan perannya sendiri dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar, khususnya dalam konteks tindak lanjut LoI dengan Kota Miri.

Penelitian ini juga menggunakan teori paradiplomasi sebagai pisau analisis untuk memahami keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional. Paradiplomasi merupakan fenomena munculnya aktor lokal dalam hubungan internasional yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan interaksi transnasional dengan tujuan spesifik (Mukti 2015). Fenomena ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara telah berkembang, sehingga pemerintah daerah berbagi kekuasaan dalam urusan internasional, meskipun negara tetap memegang kedaulatan tertinggi (Mukti 2020). Menurut Lecours (2008), praktik paradiplomasi dapat dikategorikan dalam tiga (3) kelompok: pertama, hubungan dan kerja sama antara pemerintah daerah atau 'sub-negara' hanya berfokus pada aspek ekonomi seperti perluasan pasar, pengembangan investasi ke luar negeri, dan penanaman modal. Dalam konteks ini, tidak ada keterlibatan motif yang lebih rumit, seperti politik atau budaya; kedua, ada bentuk paradiplomasi yang mencakup banyak bidang kerja sama yang bersifat *multipurposes*, yang melibatkan ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan transfer teknologi secara timbal balik; dan ketiga, paradiplomasi yang lebih kompleks dimana faktor-faktor politik dan identitas nasional wilayah yang spesifik ikut berperan (Mukti 2015).

Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kota Singkawang menerapkan praktik paradiplomasi dengan pendekatan *multipurpose*. Kerja sama dengan Kota Miri tidak hanya terbatas pada bidang pariwisata, tetapi juga meluas ke sektor budaya dan ekonomi kreatif, sebagaimana tertuang dalam LoI yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Singkawang berupaya memperkuat posisinya dalam hubungan internasional dengan mengutamakan kepentingan spesifik daerah. Praktik paradiplomasi ini menjadi sarana bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat posisi mereka dalam hubungan internasional

dengan mengutamakan kepentingan spesifik daerah. Praktik paradiplomasi ini menjadi sarana bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat posisi mereka dalam hubungan internasional dengan fokus pada kepentingan spesifik mereka. Kolaborasi antara Pemerintah Kota Singkawang dan Kota Miri yang mencakup berbagai bidang diharapkan dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak, meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing, dan memperkuat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan internasional.

Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum *Letter of Intent (LoI) Friendship City*

LoI *Friendship City* merupakan suatu langkah insiatif dari Pemerintah Kota Singkawang ketika Pemerintah Kota Miri melakukan kunjungan ke Kota Singkawang sebagai bagian dari tahapan terbentuknya *sister city*. Pada dasarnya, *Letter of Intent* adalah *outline* dokumen persetujuan antara dua atau lebih pihak sebelum menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan kerja sama (MIR ABM 2016).

Dalam penerapannya, beberapa LoI sifatnya mengikat, tetapi seringkali diabaikan begitu saja oleh para pihak yang terlibat, terutama para insiatornya. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang terlibat dalam negosiasi yang beranggapan bahwa LoI bukanlah suatu dokumen yang menyatakan ketertarikan dan keseriusan dalam suatu kerja sama yang hendak dicapai. Hal tersebut juga didorong oleh tidak adanya pemaksaan karena LoI bukanlah perjanjian resmi dan tidak adanya konsekuensi apapun yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam LoI termasuk para insiatornya.

LoI sebagai langkah awal dalam menjalin hubungan dan kesepakatan secara bilateral dengan suatu negara memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari LoI yaitu untuk (1) mengintiprestasikan dan menguraikan poin yang penting dari suatu kesepakatan demi kenyamanan semua pihak yang terlibat dalam negosiasi; (2) mengumumkan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi yang diharapkan dapat mencapai suatu kesepakatan bersama; dan (3) jaminan bagi para pihak apabila selama negosiasi berlangsung tidak dapat mencapai suatu kesepakatan. Dengan demikian LoI bukan hanya sekadar dokumen formal dalam memulai kerja sama dengan negara lain, namun juga sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam memulai proses negosiasi dan membangun hubungan saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang terlibat.

Sebelum kedatangan perwakilan Kota Miri ke Kota Singkawang, Pemerintah Kota Singkawang telah berinisiatif membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Singkawang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor: 134/204/SETDA.PEM-C Tahun 2021 untuk merumuskan poin-poin kerja sama yang tertuang dalam LoI. Setelah dirumuskannya poin-poin kerja sama dalam LoI, pimpinan dari Kota Singkawang mengambil inisiatif dan peluang dari kedatangan perwakilan kota Miri ke Kota Singkawang untuk memulai kerja sama *sister city* (Oxtora 2022). Inisiatif dan langkah dari Pemerintah Kota Singkawang, didukung dan disambut dengan baik oleh pihak Pemerintah Kota Miri agar kerja sama yang terjalin dapat didorong lebih jauh dengan merumuskannya dalam MoU, dan bukan hanya sebatas LoI.

Keinginan dan ekspektasi pihak Pemerintah Kota Miri untuk mendorong kerja sama *sister city* lebih jauh dengan Pemerintah Kota Singkawang dalam bentuk MoU dan bukan hanya sebatas LoI, tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah Kota Singkawang. Hal ini dikarenakan, pihak Pemerintah Kota Singkawang sebagai pihak yang berinisiatif dalam melakukan kerja sama *sister city* tidak boleh melanggar sebelas tahapan yang sudah di atur Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Luar Negeri. Namun pada kenyataannya, inisiatif terbentuknya LoI *Friendship City* tidak melalui izin dari Menteri Dalam Negeri dan tahapan yang telah di atur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, sehingga mengakibatkan dukungan dan kesiapan yang kurang dari berbagai pihak yang akan dilibatkan dalam kerja sama antara Pemerintah Kota Singkawang dan Kota Miri. Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, tahap peninjauan baru dilakukan oleh Pemerintah Kota Miri, sementara Pemerintah Kota Singkawang belum melakukan peninjauan kembali pasca ditandatanganinya LoI.

Terkait dengan LoI, dokumen formal yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang sebanyak dua lembar ini berfungsi sebagai instrumen awal dalam memulai hubungan dengan Pemerintah Kota Miri, khususnya dalam bidang pariwisata. Dengan kata lain, LoI adalah langkah awal dari salah satu tahapan dalam proses kesepakatan antara dua Pemerintah kota dari dua negara, yaitu Pemerintah Kota Singkawang dan Pemerintah Kota Miri. LoI ini memuat beberapa hal penting yang mencakup tujuan dan lingkup kerja sama yang akan dijalin, yakni membentuk hubungan kota bersaudara antara kedua pihak, guna memajukan dan memperluas kerja sama yang saling menguntungkan dalam pembangunan kedua kota. Dalam implementasinya, masing-masing pihak sepakat untuk melaksanakan pernyataan kehendak ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, dalam beberapa bidang yang telah disepakati.

Salah satu bidang utama yang menjadi fokus adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam hal ini, kedua kota berkomitmen untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui paket wisata dan promosi bersama, serta memperkuat pemasaran produk ekonomi kreatif yang ada di kedua kota. Selain itu, bidang budaya juga menjadi perhatian dalam LoI *Friendship City*, dengan fokus pada pengembangan atraksi budaya yang dapat memperkaya hubungan antar kedua kota. Tak hanya itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk menjajaki bidang lain yang dianggap bermanfaat bagi kedua kota. Sebagai bagian dari upaya kerja sama yang lebih erat, kedua pihak sepakat untuk melakukan kunjungan timbal balik tingkat tinggi. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama yang mendukung perkembangan bersama antara kedua kota di bidang-bidang yang telah disepakati.

Dari poin-poin di atas terlihat bahwa terlihat Pemerintah Singkawang bersama Pemerintah Kota Miri sepakat melakukan paradiplomasi yang melibatkan berbagai bidang dalam kerja sama atau '*multipurposes*' khususnya di bidang pariwisata. LoI yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Kota Miri masih bersifat umum dan tidak kuat karena masa berlakunya sampai 5 tahun. Oleh karena itu, pascaditandatangani LoI membutuhkan tindak lanjut hingga dapat sampai pada tahapan kerja sama yang formal sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020. Hal ini diperlukan agar kerja sama *sister city* ini memiliki landasan yang kuat untuk implementasi dan kejelasan dari keberlanjutan kerja sama yang akan dijalin oleh Pemerintah Kota Singkawang dan Miri.

Upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam Menindaklanjuti LoI *Friendship City*

LoI yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sebagai insiator dengan Pemerintah Kota Miri sebagai kota tujuan yang menjadi mitra strategis dalam praktik paradiplomasi disambut secara baik oleh pemerintah pusat. Sambutan positif dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Singkawang menunjukkan bahwa inisiatif yang dilakukan Pemerintah Kota Singkawang ini diakui sebagai langkah yang bernilai dalam konteks hubungan antarpemerintah daerah/kota dalam skala internasional. Meskipun pemerintah pusat memberikan sambutan baik terhadap inisiatif Pemerintah Kota Singkawang dalam mencetus LoI *Friendship City*, langkah konkret berupa bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Singkawang dalam mengawal LoI *Friendship City* ke tahap selanjutnya belum terlihat. Dengan adanya kendala dari pemerintah pusat dalam mendapatkan dukungan konkret, maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan koordinasi dan tindakan lebih lanjut terkait LoI *Friendship City*.

Peran Pemerintah Kota Singkawang menindaklanjuti LoI *Friendship City* dengan Pemerintah Kota Miri terlihat dalam upayanya di bidang Pariwisata. Salah satunya yaitu adanya kunjungan Pj. Wali Kota Singkawang Drs.H.Sumastro, M.Si ke Kota Miri pada tanggal 20 Mei 2024 (Konsulat Jendral Republik Indonesia Kuching 2024). Inisiatif yang diambil oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam kunjungan ke Kota Miri menunjukkan komitmen dari Pemerintah Kota Singkawang untuk mewujudkan kota kembar khususnya dalam bidang pariwisata. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dengan melakukan kunjungan ke Kota Miri merupakan langkah strategis untuk mengembangkan kerja sama di sektor pariwisata di kedua kota tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kota Singkawang melalui Sekretariat Daerah melakukan promosi dengan mengadakan Borneo Expo ketika Wali Kota Singkawang Ibu Tjhai Chui Mei mendapatkan undangan untuk mengisi acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Miri dalam rangka *Christmas Parade Program*. Pada Borneo Expo, Pemerintah Kota Singkawang menyuguhkan kebudayaan etnis Tionghoa, salah satunya yaitu tarian Barongsai yang menjadi ciri khas dari Kota Singkawang. Melalui Borneo Expo, diharapkan Kota Singkawang semakin dikenal oleh masyarakat internasional, sehingga kunjungan wisatawan luar negeri semakin meningkat, khususnya dari Kota Miri. Hal ini dikarenakan antara Kota Singkawang dan Kota Miri terdapat kesamaan dan kedekatan budaya dan agama yakni Tionghoa yang juga menjadi salah satu faktor pendorong dirumuskannya LoI (Andilala dan Ardiansyah 2022).

Selain Borneo Expo, Pemerintah Kota Singkawang juga mendapatkan kesempatan untuk mengadakan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2023 yang dihadiri lebih dari 500 peserta dari dalam dan luar negeri, salah satunya Pemerintah Kota Miri sebagai tamu undangan (Media Center Singkawang 2023). Diundangnya Pemerintah Kota Miri dalam Festival HAM dikarenakan Kota Singkawang dan Miri memiliki kesamaan dalam bidang toleransi (Suhendra 2022). Dengan adanya kesamaan yang dimiliki oleh Kota Singkawang dan Kota Miri, maka diharapkan LoI *Friendship City* yang dibangun tidak akan terhenti di tengah jalan.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa peran Pemerintah Kota Singkawang pascaditandatangani LoI *Friendship City* baru terlihat dan sebatas dengan penyelenggara *expo*. Kegiatan ini adalah bentuk promosi agar dapat memajukan dan memperluas kerja sama guna memicu pertumbuhan kunjungan wisatawan luar negeri dari kedua belah pihak, terutama dari wisatawan dari Kota Miri. Hal ini sejalan dengan poin dua (2) yang tertuang dalam LoI *Friendship City*, bahwa dalam melaksanakan pengimplementasian dari Pernyataan Kehendak Kerja Sama/LoI dilakukan melalui paket wisata dan promosi dalam meningkatkan

kunjungan wisatawan ke kedua kota. Namun, pemerintah Kota Singkawang belum mengeluarkan regulasi ataupun kebijakan secara spesifik terkait langkah selanjutnya yang diambil untuk melanjutkan tahapan dalam menjalin kerja sama *sister city* dengan pemerintah Kota Miri.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang di bawahnya, yakni Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang yang memegang bidang pariwisata Kota Singkawang. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam mendukung LoI juga melakukan promosi melalui berbagai kegiatan yang ada di Kota Singkawang seperti Cap Go Meh, Ngabayot, mempromosikan tempat-tempat destinasi wisata di Kota Singkawang dengan membagikan *pamflet* maupun buku profil kepariwisataan Kota Singkawang, serta menjalin kerja sama antara *tour guide* Kota Singkawang dengan *tour guide* Malaysia. Selain itu, Pemerintah Kota Singkawang akan mengembangkan kawasan pariwisata yang ke depannya akan ditawarkan pada investor untuk dikembangkan. Rencananya, kawasan pariwisata yang akan ditawarkan adalah milik Pemerintah Kota Singkawang, yakni Batu Belimbing di Singkawang Timur dan kawasan pariwisata lainnya milik swasta (Suara Nusantara 2023).

Dalam hal pengembangan pariwisata setelah penandatanganan LoI dengan Pemerintah Kota Miri, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebagai salah satu perangkat daerah dalam Pemerintah Kota Singkawang berharap mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak salah satunya masyarakat lingkungan yang ada di destinasi pariwisata. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata sehingga akhirnya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara dengan cara membuat bangunan yang unik yang bisa dijadikan *spot* atau tempat menarik bagi wisatawan untuk mengabdikan momen ketika mereka berada di tempat wisata. Selain itu, mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bersama-sama memajukan pariwisata Kota Singkawang dengan memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa tong sampah untuk dibagikan kepada destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pemerintah Kota Singkawang dalam Menindaklanjuti LoI *Friendship City*

Pascaditandatannya LoI, Pemerintah Kota Singkawang menghadapi berbagai hambatan untuk meneruskan langkah-langkah secara formal dari kerja sama *sister city* yang akan dijalin oleh kedua kota. Hambatan-hambatan tersebut antara lain terkait dengan kegagalan komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat, serta kapasitas sumber daya manusia yang tidak optimal di Pemerintah Kota Singkawang.

Kegagalan komunikasi menjadi salah satu faktor internal yang signifikan dalam menghadapi tantangan ini. Komunikasi yang tidak intens dan kurang efektif menjadi penghambat utama dalam menjalankan paradiplomasi pasca penandatanganan LoI *Friendship City*. Komunikasi yang baik sangat penting untuk menjalin hubungan yang solid, baik antarnegara maupun antar Pemerintah Daerah. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat memicu kesalahpahaman serta konflik kepentingan antara pihak yang terlibat, yang pada akhirnya dapat merugikan proses diplomasi yang telah dilakukan (Utomo 2024).

Salah satu contohnya adalah kegagalan dalam menyampaikan kebutuhan yang diperlukan oleh dinas atau perangkat terkait di dalam struktur Pemerintahan Kota Singkawang. Berdasarkan wawancara dengan Virgiani Dini Happy, S.IP, Pegawai Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Singkawang, diungkapkan bahwa terdapat kurangnya antusiasme dari perangkat daerah untuk menggali potensi dan membuat kajian tentang kerja sama yang akan dilaksanakan. Hal ini terjadi karena Pemerintahan Kota Singkawang terdiri dari berbagai dinas dan badan yang memiliki tujuan berbeda-beda. Tanpa adanya komunikasi yang efektif di antara pihak-pihak terkait, praktik paradiplomasi menjadi tidak sinkron dan tidak konsisten. Akibatnya, banyak pihak yang terlibat merasa kurang antusias dalam melaksanakan tahapan berikutnya dalam paradiplomasi, meskipun LoI *Friendship City* sudah ditandatangani.

Selain itu, dukungan dan keterlibatan dari masyarakat Kota Singkawang terhadap LoI dalam pengembangan pariwisata juga minim. Hal ini dikarenakan tidak terbangunnya komunikasi antara Pemerintah Kota Singkawang dengan masyarakat Kota Singkawang. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, masyarakat tidak merasa terlibat dalam proses tersebut, sehingga tidak terlihat adanya penolakan atau penerimaan yang signifikan dari masyarakat sebagai salah satu *audience* atau *stakeholder* yang akan terlibat dalam kerja sama ini.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak optimal juga menjadi hambatan utama dalam proses paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Lambatnya tahapan dalam menjalankan kerja sama pasca penandatanganan LoI *Friendship City* dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan maksimal dari SDM yang tersedia. Nganje (2013) menjelaskan bahwa salah satu kendala utama bagi banyak pemerintah daerah, khususnya di negara berkembang, dalam melaksanakan paradiplomasi adalah ketidakefektifan kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau kota (Utomo 2024). Dalam hal ini, kapasitas SDM yang dimiliki Pemerintah Kota Singkawang, baik dari segi kualitas maupun jumlah, sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan paradiplomasi.

Praktik paradiplomasi yang efektif memerlukan kemampuan spesifik dari para pegawai atau pelaksana yang tidak hanya mencakup pemahaman mengenai urusan internasional, tetapi juga keterampilan dalam bernegosiasi, wawasan tentang budaya, dan kapasitas untuk membangun serta menjaga jaringan internasional yang telah terbentuk. Tanpa kapasitas yang memadai, sulit bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk memaksimalkan potensi kerja sama internasional yang telah dibangun melalui LoI, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan dari kerja sama tersebut. Namun, meskipun pemahaman tentang praktik paradiplomasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang masih minim, Pemerintah Kota Singkawang telah berinisiatif melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah lainnya, yaitu Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang terlebih dahulu memiliki pengalaman dalam melaksanakan tahapan kerja sama *sister city* dengan pemerintah Kota Miri. Upaya ini diambil sebagai salah satu solusi agar LoI yang telah disepakati kedua belah pihak dapat diteruskan ke tahapan selanjutnya dengan memanfaatkan pengalaman dan wawasan yang dimiliki oleh pemerintah Tangerang Selatan.

Secara keseluruhan, hambatan yang muncul, baik dari segi komunikasi yang kurang efektif maupun kapasitas SDM yang tidak optimal saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam menentukan keberhasilan implementasi paradiplomasi di Kota Singkawang. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya peningkatan komunikasi yang lebih intens dan efektif, serta pengembangan kapasitas SDM yang dapat mendukung kelancaran dan keberlanjutan kerja sama internasional yang telah terjalin (Utomo 2024).

Walaupun anggaran yang digunakan dalam mendukung tahapan pasca-LoI *Friendship City* dengan Pemerintah Kota Miri berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat maka dapat menjadi penentu dalam mendukung tersedianya keuangan yang cukup untuk melakukan kerja sama *sister city* dengan Pemerintah Kota Miri. Anggaran yang tidak cukup dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan agenda yang memerlukan dana seperti rapat kerja, *expo*, dan kunjungan delegasi Pemerintah Kota Singkawang ke Kota Miri. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat diperlukan agar Pemerintah Kota Singkawang dapat memperoleh informasi dan hubungan diplomatik berupa jejaring internasional yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti LoI dengan Pemerintah Kota Miri dalam bidang pariwisata.

Di lain sisi, kurangnya dukungan dari masyarakat Kota Singkawang dapat menurunkan kepercayaan dan legitimasi dari Pemerintah Kota Singkawang dalam upaya menjalin kerja sama *sister city* dengan Pemerintah Kota Miri. Ketidakpedulian masyarakat Kota Singkawang terhadap upaya Pemerintah Kota Singkawang dalam menjalin kerja sama kota kembar melalui LoI dengan Pemerintah Kota Miri dapat berakibat pada tidak adanya umpan balik yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kota Singkawang, sehingga kerja sama tidak tepat sasaran. Kemudian, minimnya perhatian dan dukungan masyarakat Kota Singkawang terhadap LoI dapat berakibat pada ketidakterbukaan, pelaksanaan tanggung jawab serta pengambilan keputusan yang kurang baik terhadap tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang pascaditandatannya LoI *Friendship City*.

Dampak LoI *Friendship City* dalam Bidang Pariwisata

Sektor pariwisata sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 10% bagi Kota Singkawang memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah yang juga didukung oleh sektor-sektor penunjang lainnya seperti transportasi, perhotelan, dan kuliner sehingga dapat memicu kenaikan wisatawan domestik dan mancanegara. Oleh sebab itu, Kota Singkawang disebut sebagai Kota Pariwisata dan menjadi destinasi pariwisata utama di Provinsi Kalimantan Barat. Upaya Pemerintah Kota Singkawang dengan melakukan promosi, salah satunya melalui *expo*, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua pihak. Dampak positif setelah ditandatannya LoI *Friendship City* dalam bidang pariwisata terlihat melalui kenaikan kunjungan wisatawan luar negeri ke Kota Singkawang. Kenaikan kunjungan wisatawan luar negeri ke Kota Singkawang dapat terlihat di tabel berikut:

Tabel 1. Kunjungan Wistawan Luar Negeri

Bulan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	148	168	94	17	275	687
Februari	163	260	20	3	368	921
Maret	204	144	4	-	352	1051
April	228	-	7	15	661	940
Mei	168	-	5	38	871	1354
Juni	163	16	12	41	1269	977
Juli	171	11	-	178	737	1576
Agustus	270	100	4	219	1414	1300
September	323	103	-	498	989	2318
Oktober	255	-	-	435	534	-
November	250	-	-	328	773	-
Desember	445	-	-	266	1928	-
Total	2788	803	146	2038	10171	11124

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (2024).

Tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan dari luar negeri tahun 2022-2024 pascaditandatangani LoI pada tanggal 01 Oktober 2022. Kenaikan kunjungan wisatawan dari luar negeri ke Kota Singkawang membuktikan bahwa daya tarik Kota Singkawang sebagai destinasi wisata utama di Kalimantan Barat semakin kuat. Hal ini membuktikan bahwa langkah awal pemerintah Kota Singkawang dalam melakukan kerja sama *sister city* dengan pemerintah Kota Miri melalui LoI memberikan dampak positif bagi sektor kota pariwisata Kota Singkawang. Kenaikan kunjungan wisatawan dari luar negeri diharapkan dapat membuka peluang bagi pertukaran budaya dan promosi destinasi, sehingga meningkatkan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Kota Singkawang. Selain itu, dengan adanya kenaikan kunjungan wisatawan luar negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur Kota Singkawang agar semakin lebih baik lagi. Terlebih lagi, dengan adanya peluang tersebut diharapkan akan semakin memperkenalkan Kota Singkawang sebagai destinasi Kota pariwisata utama di Provinsi Kalimantan Barat.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Singkawang, sebagai entitas sub-negara dalam arena internasional, menerapkan praktik paradiplomasi melalui LoI dengan Pemerintah Kota Miri untuk menjalin kerja sama *sister city* dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan utama dari praktik paradiplomasi ini adalah memajukan dan memperluas hubungan bilateral yang saling menguntungkan demi pengembangan pariwisata Kota Singkawang, yang tercermin dalam peran aktifnya melalui berbagai upaya konkrit setelah ditandatanganinya LoI dengan Pemerintah Kota Miri. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam menindaklanjuti

LoI dengan pemerintah Kota Miri. Namun, pemerintah Kota Singkawang tetap menunjukkan komitmennya dengan mencari solusi agar LoI yang telah disepakati kedua belah pihak dapat diteruskan sehingga mencapai tahapan kerja sama formal yang disetujui secara resmi oleh kedua belah pihak sebagai landasan yang kuat dalam menjalin kerja sama *sister city*.

Adanya LoI yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Singkawang sebagai langkah awal dalam menjalin kerja sama *sister city* dengan Pemerintah Kota Miri telah memberikan dampak positif bagi pariwisata Kota Singkawang. Hal ini terlihat dari semakin kuatnya daya tarik Kota Singkawang sebagai pilihan destinasi wisata di tingkat internasional yang menarik dan layak untuk dikunjungi dengan peningkatan kunjungan wisatawan dari manca negara.

Adapun kendala yang ditemukan oleh peneliti dalam pelaksanaan inisiatif setelah ditandatanganinya LoI antara pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Kota Miri adalah minimnya panduan secara teknis terkait kerja sama *sister city* dan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah Kota Singkawang sehingga menyebabkan lambatnya kemajuan kerja sama *sister city* menuju tahapan secara formal. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota pascapenandatanganan LoI. Pertama, Pemerintah Kota Singkawang dapat meningkatkan kapasitas pegawai atau pelaksana yang terlibat dengan mengadakan pelatihan tentang tata cara diplomasi, khususnya dalam konteks kerja sama antar daerah atau kota di luar negeri. Selain itu, pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai perangkat daerah akan mempermudah komunikasi serta memungkinkan kajian bersama terkait bentuk kerja sama yang akan dijalankan.

Kedua, transparansi dalam pelaksanaan dan tahapan kerja sama pasca penandatanganan LoI menjadi hal yang penting, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang pariwisata. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Singkawang perlu membentuk saluran komunikasi resmi yang memungkinkan adanya umpan balik serta keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan, sehingga proses kerja sama dapat berjalan lebih terbuka dan efektif. Ketiga, guna memperkuat posisi LoI dalam tahapan kerja sama, Pemerintah Kota Singkawang perlu memperoleh persetujuan serta kewenangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dokumen resmi untuk pelimpahan wewenang dalam menjalin hubungan luar negeri dengan Pemerintah Kota Miri. Langkah ini penting agar Pemerintah Kota Singkawang memiliki legitimasi yang kuat dan dapat menjalankan perannya sebagai mitra strategis secara optimal pasca penandatanganan LoI.

Peneliti mengharapkan ke depannya Pemerintah Kota Singkawang dapat melakukan kajian mendalam tentang regulasi yang perlu dirumuskan dan persiapan untuk memberikan dampak yang signifikan bagi kerja sama *sister city* dengan pemerintah Kota Miri.

Daftar Pustaka

Buku

- Harnisch, S., 2011. "Role Theory Operationalization of Key Concepts", dalam S. Harnisch, C. Frank, & H. W. Maull (eds.), 2011. *Role Theory in International Relations Approaches and Analyses*. London: Routledge.
- Marchetti, R., 2021. *City Diplomacy: From City-States To Global Cities*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tavares, R., 2016. *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. Oxford: Oxford University Press.
- Utomo, A. B., 2024. *Diplomasi Kota: Teori, Praktik, dan Prospek* (Vol. I). Yogyakarta: Suluh Media.

Artikel Jurnal

- Mukti, T. A., 2015. "Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1): 85-94.
- Mukti, T. A., 2020. "Politik Paradiplomasi Pemerintah Republik Indonesia", *Jurnal Majelis*, 6 (2020): 1-20.
- Putra, R.M. et al., 2021. International Relations Perspective of Sister City: Concept and Practices. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 9(2): 172-184.
- Safitri, N. Et al., 2023. "Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia", *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1): 56-68. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2016>

Laporan Penelitian

- Lecours, A., 2008. "Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World", *Clingendael Institute*. <https://www.jstor.org/stable/resrep05373>

Prosiding

- Patriani, I. et al., 2023. "Network Governance: Participatory Approach to Contribute at Singkawang Tourism Policy (Case on Cap Go Meh Event)", dalam IAPA Proceeding Conference: New Public Governance: Reflection on Administration Science, Desember 2023. Yogyakarta: FISIPOL Universitas Gadjah Mada. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2023.891>

Skripsi

Putri, R. S., 2014. Penyelesaian Sengketa Dagang Rokok Kretek antara Indonesia-Amerika Serikat di DSB (Dispute Settlement Body) WTO Periode 2009-2012. Skripsi: Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Artikel Daring

Andilala, & Ardiansyah, S., 2022. "Kota Miri Serawak ingin mempererat kerja sama dengan Kota Singkawang" [Online]. Dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/3151781/kota-miri-serawak-ingin-mempererat-kerja-sama-dengan-kota-singkawang> [diakses 17 September 2024].

Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2024. "Distribusi PDRB Kota Singkawang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha" [Online]. Dalam <https://singkawangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDMjMg==/distribusi-pdrb-kota-singkawang-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html> [diakses 17 September 2024]

Festival HAM : Ajak Publik Rayakan HAM, Inklusivitas dan Toleransi, 2023. [Online]. Dalam <https://mediacenter.singkawangkota.go.id/berita/festival-ham-ajak-publik-rayakan-ham-inklusivitas-dan-toleransi/> [diakses 17 September 2024].

Konsulat Jendral Republik Indonesia Kuching, 2024. "Konsul Jenderal RI Kuching, Bapak R. Sigit Witjaksono telah menghadiri acara Hari Ulang Tahun Kota Miri ke-19 Tahun" [Online]. Dalam <https://www.kemlu.go.id/kuching/id/news/29142/konsul-jenderal-ri-kuching-bapak-r-sigit-witjaksono-telah-menghadiri-acara-hari-ulang-tahun-kota-miri-ke-19-tahun> [diakses 19 September 2024].

Koran Sindo, 2021. "Menakar Dampak Kerja Sama Sister City" [Online]. Dalam <https://nasional.sindonews.com/read/354472/15/menakar-dampak-kerja-sama-sister-city-1614863035?showpage=all> [diakses pada 8 November 2024].

MIR ABM, 2016. "Lokakarya(4) : Bentuk-bentuk Agreement Internasional" [Online]. Dalam <https://mir.stie-mce.ac.id/2016/11/04/lokakarya-4-bentuk-bentuk-agreement-internasional/> [diakses 21 September 2024].

- Munir, Misbahul, 2022. "Friendship City Hubungkan Singkawang dan Miri" [Online]. Dalam <https://pontianakpost.jawapos.com/singkawang/1462738971/friendship-city-hubungkan-singkawang-dan-miri?> [diakses 25 November 2024].
- Objek Wisata Batu Belimbing di Singkawang, Kalimantan Barat akan Maju dan Berkembang, 2023. [Online]. Dalam <https://www.suaranusantara.co.id/2023/12/objek-wisata-batu-belimbing-di.html> [diakses 8 November 2024].
- Oxtora, R., 2022. "Kota Singkawang-Sarawak jalin kerja sama bidang pariwisata dan budaya" [Online]. Dalam <https://www.antaranews.com/berita/3154685/kota-singkawang-sarawak-jalin-kerja-sama-bidang-pariwisata-dan-budaya> [diakses 16 September 2024].
- Pujiati, 2024. "6 Perbedaan Penelitian Dasar dan Terapan" [Online]. Dalam <https://penerbitdeepublish.com/perbedaan-penelitian-dasar-dan-terapan/> [diakses 20 September 2024].
- Sejarah Baru Singkawang, Bandara Segera Beroperasi 18 April Mendatang, 2024. [Online]. Dalam <https://mediacenter.singkawangkota.go.id/berita/sejarah-baru-singkawang-bandara-segera-beroperasi-18-april-mendatang/> [diakses 20 September 2024].
- Singkawang Dan Miri Sarawak Bangun Kerjasama Bidang Pariwisata, Budaya Dan Ekraf, 2022 [Online]. Dalam <https://mediacenter.singkawangkota.go.id/berita/singkawang-dan-miri-sarawak-bangun-kerjasama-bidang-pariwisata-budaya-dan-ekraf/> [diakses 19 September 2024].
- Singkawang dan Miri Sarawak Bangun Kerjasama Bidang Pariwisata, Budaya dan Ekraf, 2022 [Online]. Dalam <https://mediacenter.singkawangkota.go.id/berita/singkawang-dan-miri-sarawak-bangun-kerjasama-bidang-pariwisata-budaya-dan-ekraf/> [diakses pada 10 November 2024].
- Suhendra, 2022. "Singkawang dan Miri Sarawak Bangun kerjasama Bidang Pariwisata, Budaya dan Ekraf" [Online]. Dalam <https://www.suarakalbar.co.id/2022/10/singkawang-dan-miri-sarawak-bangun-kerjasama-bidang-pariwisata-budaya-dan-ekraf/> [diakses 5 November 2024].